



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance maka penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan pemerintah wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Sesuai amanat undang-undang nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintahan nomor 58 Tahun 2005 dan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 beserta semua perubahannya serta peraturan menteri dalam negeri nomor 64 Tahun 2013, berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, kewajiban dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020 disusun secara lengkap dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konsitusi sesuai dengan ketentuan dengan Per Undang-Undangan yang berlaku dan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu Laporan Keuangan ini disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah dan mengenai perubahan atas posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah ;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi ;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhap anggarannya ;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entis akuntasimendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya ;
- e. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas akuntansi dalam mendanai aktivitasnya ;
- f. Menyediakan informasi keuangan secara konprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan serta meningkatkan efektifitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana ;
- g. Menyediakan informasi keuangan yangtrasparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menyediakan informasi mengenai belanja, aset & kewajiban beban serta ekuitas dana.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangana pemerintah, antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stadar Akuntansi Pemerintah ;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 ;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;
- h. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- i. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar tanggal 3 Oktober 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 ;
- k. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 6 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Denpasar ;
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 57 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ;
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Denpasar;
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah ;
- o. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Oktober 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2018;
- p. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
- q. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2019, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020

1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Adapun sistematika isi catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi Yang Penting

- 3.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan
- 3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 4.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 6.1.1 Belanja
 - 6.1.2 SILPA
- 4.2 Pos-pos Neraca
 - 4.2.1 Aset
 - 4.2.2 Aset Tetap
 - 4.2.3 Aset Lainnya
- 4.3 Kewajiban
 - 4.3.1 Ekuitas
- 4.4 Pos-pos Laporan Operasional
 - 4.4.1 Beban
 - 4.4.2 Surplus (Defisit) – LO
- 4.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 4.5.1 Ekuitas Awal
 - 4.5.2 Mutasi Ekuitas Tahun Berjalan
 - 4.5.3 Ekuitas Akhir

Bab V Penutup

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 13.478.007.816,00 atau 95,27 % dari anggaran yang telah tersedia sebesar Rp. 14.147.416.251,00.

Sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar TA.2020

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
2	Belanja	14.147.416.251	13.478.007.816	669.408.435	95,27
2.1	Blj. Operasi	13.572.538.751	12.914.948.516	657.590.235	95,15
2.1.1	Blj. Pegawai	5.530.951.200	5.449.690.746	81.260.454	98,53
2.1.2	Blj.Brg & Jasa	8.041.587.551	7.465.257.770	576.329.781	92,83
2.2	Blj.Modal	574.877.500	563.059.300	11.818.200	97,94
	Suplus/(Defisit)	(14.147.416.251)	(13.478.007.816)	(669.408.435)	(95,27)

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 83 Tahun 2019, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2020, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menganggarkan Belanja Daerah sebesar Rp. 14.147.416.251,00 terdiri dari belanja Pegawai sebesar Rp. 5.530.951.200,00, belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 8.041.587.551,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.574.877.500,00. Menyikapi Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2020 tersebut, beberapa strategi yang telah di tempuh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Antara Lain :

- a. Belanja Daerah disusun berdasarkan skala prioritas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat ;
- b. Belanja Daerah pada tiap kegiatan diupayakan dengan tolak ukur dan target kinerjanya dalam rangka mewujudkan tujuan Organisasi ;
- c. Belanja Daerah dilaksanakan sesuai program, kegiatan yang telah ditetapkan ;
- d. Belanja Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif dalam mewujudkan sasaran kinerja.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mempunyai 6 program yang terdiri dari 20 kegiatan.

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang dilaksanakan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung
- b. Belanja Langsung
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 3) Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
 - Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
 - 4) Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Masa :
 - Desiminasi Informasi melalui Radio Publik Kota Denpasar
 - Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desimiasi Informasi Melalui Pameran Hut Kota Denpasar.
 - Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar.
 - Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar.
 - Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (Damamaya).
 - Pengembangan teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing.
 - Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online.
 - Penyusunan SOP Smart Control Room
 - Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desimiasi Informasi Melalui Pameran HUT Propinsi Bali .
 - Pengembangan teknologi informasi layanan videotron.
 - Audit Keamanan Informasi Sistem Online di Kota Denpasar.
 - Pengembangan Sistem Berbasis Tanda Tangan Elektronik di Kota Denpasar.
 - 5) Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.
 - Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
 - Penguatan Kapasitas SDM TIK Untuk Peningkatan Tatakelola Smart City di Kota Denpasar
 - 6) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - Penyusunan Buku Denpasar Membangun
 - Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Denpasar

Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar menurut kegiatan dapat diproyeksikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas
Komunikasi, Informasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar
T.A.2020 (Menurut Kegiatan)

No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi	%
	Belanja	14.147.416.251,00	13.478.007.816,00	95,27
A	Belanja Tidak Langsung	5.530.951.200,00	5.449.690.746,00	98,53
B	Belanja Langsung	8.616.465.051,00	7.465.257.770,00	86,64
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.881.947.960,00	2.807.878.924,00	97,43
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	677.974.000,00	513.952.800,00	75,81
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	31.000.000,00	30.389.405,00	98,03
4	Desiminasi Informasi melalui radio publik Kota Denpasar	298.638.687,00	261.377.164,00	87,52
5	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desimiasi Informasi Melalui Pameran Hut Kota Denpasar	633.240.000,00	620.123.617,00	97,93
6	Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi pada Pemerintah Kota Denpasar	252.265.000,00	246.870.000,00	97,86
7	Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Internet di Kota Denpasar	3.078.625.000,00	2.830.903.010,00	91,95
8	Pengelolaan Ruang Denpasar Cyber Monitor (Damamaya)	156.393.424,00	126.886.270,00	81,13
9	Pengembangan teknologi Informasi dan Layanan Government Cloud Computing	191.160.000,00	191.021.500,00	99,93
10	Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media Online	150.200.000,00	145.523.300,00	96,89
11	Penyusunan SOP Smart Control Room	985.000,00	985.000,00	100,00
12	Pembinaan dan pengembangan Sumber	-	-	

	Daya Komunikasi dan Informasi berupa Desimiasi Informasi Melalui Pameran HUT Propinsi Bali .			
13	Pengembangan Teknologi informasi layanan videotron	159.950.000,00	149.280.100,00	93,33
14	Audit Keamanan Informasi Sistem Online di Kota Denpasar	52.790.000,00	51.960.000,00	98,43
15	Pengembangan Sistem Berbasis Tanda Tangan Elektronik di Kota Denpasar	46.820.000,00	46.690.000,00	99,72
16	Workshop PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	-	-	
17	Penguatan Kapasitas SDM TIK Untuk Peningkatan Tatakelola Smart City di Kota Denpasar	4.475.980,00	4.475.980,00	100,00
18	Penyusunan Buku Denpasar Membangun	-		
19	Penyusunan Buku Profil Daerah Kota Denpasar	-		
	Total	14.147.416.251,00	13.478.007.816,00	95,27

2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan program Tahun Anggaran 2020 serta dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan skala prioritas dalam pembelanjaan daerah. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah mencapai 95,27 %. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Tahun Anggaran 2020 sudah mencapai target.

BAB III

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

3.1 Entitas Akuntansi Pelaporan Keuangan

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan penggunaan anggaran / pengguna barang, oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang merupakan Tipe A dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diundung tanggal 9 Desember 2016 dan berlaku efektif mulai Tahun 2017. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

- Kedudukan :
 - a. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- Tugas Pokok :

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintah yang terjadi menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kepada Kota.
- Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah Basis Akruwal, yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- a. Laporan Keuangan disusun dan disajikan dalam rupiah dan disusun berdasarkan biaya historis (*historical cost*) atau nilai wajar ;

- b. Entitas akuntansi pelaporan yang dimaksudkan dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ;
- c. Laporan Keuangan terdiri dari :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran
 - 2) Neraca
 - 3) Laporan Operasional
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan Keuangan yang disajikan dalam Rupiah, disusun dengan basis akrual untuk Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dan dengan konsep biaya historis.
- e. Laporan Realisasi Anggaran disusun dengan basis kas.
- f. Periode akuntansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun bersangkutan yang dalam hal ini sesuai dengan tahun anggaran.

3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah.

- a. Beban dan Belanja

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar maupun telah menimbulkan kewajiban.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas umum daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan.
- b. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.
- c. Persediaan

Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik. Metode perpetual, dimana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Sedangkan metode periodik, untuk mengetahui jumlah persediaan akhir dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Metode yang dipakai Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Kota Denpasar.
- d. Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

e. Konstruksi dalam pekerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

f. Aset lainnya (Aset Tidak Berwujud)

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan yaitu harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, Ringkasan penerapan kebijakan akun yang penting berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP sesuai dengan kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

3.4.1 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca.

Setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Kota Denpasar tidak terdapat setara kas.

3.4.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan, yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

3.4.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- Tanah
- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, irigasi dan jaringan
- Aset tetap lainnya
- Kontruksi dalam pengerjaan

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud ;

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas.
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan.
- Merupakan obyek pemeliharaan atau memerlukan biaya untuk dipelihara.
- Memenuhi kriteria matrial/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

3.4.4 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya menjadi kewenangan OPD meliputi aset tak berwujud dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah karena rusak berat, Usang, atau karena sedang menunggu Proses Pemindah tangganan direklasifikasi kedalam asset lain-lain.

3.4.5 Belanja dan Beban

Dalam laporan realisasi anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja. Sedangkan laporan operasi (LO) menyebutnya dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan belanja merupakan semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban di akui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
- Terjadinya konsumsi aset
- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa

- Belanja diakui pada saat:
- Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan atau diterimanya SPJ fungsional oleh BUD.

BAB IV

PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah.

Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Anggaran Kerja.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 14.147.416.251,00 realisasi sebesar Rp. 13.478.007.816,00 atau mencapai 95,27%.

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa serta belanja tidak terduga, yang terdiri dari:

- Belanja Pegawai : Rp. 5.530.951.200,00
- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 8.041.587.551,00
- Belanja Tidak Terduga : Rp. 150.000.000,00 (Nilai Barjas)

b. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga yang didasari pada penerbitan SP2D Nomor : 0753/TU/3.00.03.00/B02/2020, tanggal 14 Juli 2020. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan penerimaan dana Belanja Tidak Terduga yang diperuntukkan sebagai Belanja Pembuatan Sistem Penanganan Percepatan Covid-19 sejumlah Rp.150.000.000-. Adapun realisasi dana tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2020.

c. Belanja Modal

Belanja modal dengan anggaran Rp. 574.877.500,00, realisasi pengeluaran sebesar Rp.563.059.300,00 atau mencapai 97,94%.

4.1.2 SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

4.2 Pos-Pos Neraca

4.2.1 Aset.

Aset Lancar

Kas di kas daerah	Rp. -
Kas Di Bendahara Pengeluaran	Rp. -
Persediaan	Rp. 12.109.500
Yang terdiri dari :	
- ATK	Rp. 5.895.000
- Alat listrik dan alat elektronik	Rp. 247.500
- Materai	Rp. -
- Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Rp.779.500
- Bahan Bakar Minyak	Rp.-
- Cetakan	Rp.5.187.500

4.2.2 Aset Tetap.

Ringkasan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut;

1. Tanah	Rp. -
2. Peralatan dan Mesin	Rp. 24.553.515.696,79
3. Gedung dan Bangunan	Rp. 24.400.000,00
4. Jalan,Irigasi,dan Jaringan	Rp. 974.559.665,00
5. Aset Tetap Lainnya	Rp. 43.946.650,00
6. Akumulasi Aset Tetap	<u>Rp.(21.060.297.128,11)</u>
Jumlah Aset Tetap	Rp. 4.536.124.883,68

4.2.3 Aset Lainnya.

1. Aset Tak Berwujud	Rp. 1.834.611.900,00
2. Akumulasi Amortisasi	Rp. (1.469.569.649,00)
3. Aset Lain-Lain	<u>Rp. -</u>
Jumlah Aset Lainnya	Rp. 365.042.251,00

Jumlah Aset adalah **Rp. 4.913.276.634,68.**

1. Tanah

Merupakan tanah milik Pemerintah Kota Denpasar yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik per 31 Desember 2020.

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp	-
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	-

2. Peralatan dan Mesin

Merupakan Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi, dan Peralatan kantor lainnya. Rincian perhitungan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp	24.626.791.396,79
- Belanja Modal	Rp	535.126.800,00
-Reklas dari KIB Aset Jalan, Irigasi, Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin	Rp	3.300.000,00
-Reklas dari Aset Peralatan dan Mesin ke KIB Aset Jalan,Irigasi dan Aset Lainnya	Rp	(256.729.000,00)
-Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin	Rp	(354.973.500,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp	24.553.515.696,79

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan milik Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar antara lain, terdiri dari bangunan gedung kantor lainnya. Rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp	24.400.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	24.400.000,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Merupakan Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari instalasi dan jaringan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp	754.193.165,00
- Belanja Modal	Rp	27.932.500,00
-Reklas dari KIB Aset Jalan, Irigasi,Jaringan ke Aset Peralatan dan Mesin	Rp	(3.300.000,00)
-Reklas dari Aset Peralatan dan Mesin ke KIB Aset Jalan,Irigasi dan Jaringan	Rp	195.734.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	974.559.665,00

5. Aset Tetap Lainnya

Merupakan Aset Tetap lain yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2020 yang terdiri dari buku/barang perpustakaan, barang bercorak seni budaya dan olah raga, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp	43.946.650,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	43.946.650,00

6. Aset –Aset Lainnya

Merupakan Aset Lain-Lain yang dimiliki Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar per 31 Desember 2020 berupa Aset Tak Berwujud, dengan rincian perhitungan sebagai berikut;

Uraian		Nilai Perolehan
Saldo Awal per 1 Januari 2020	Rp	1.623.616.900,00
- Reklas dari KIB Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lain-Lain (Aplikasi Jaga Baya)	Rp	60.995.000,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	1.684.611.900,00

4.3 Kewajiban

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki Kewajiban/Hutang yang belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2020 yaitu Hutang Belanja Telepon sebesar **Rp.990.000** dalam hal ini Hutang tersebut akan dibayarkan pada Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2021.

4.3.1 Ekuitas

Ekuitas dalam neraca Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2020 disajikan senilai **Rp. 4.912.286.634,68** yang merupakan perhitungan antara jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban.

4.4 Pos-pos Laporan Operasional.

4.4.1 Beban

Jumlah beban dalam laporan operasional tahun 2020 tersaji senilai Rp. 15.139.353.240,00, terdiri dari beban operasi meliputi dari beban pegawai Rp. 5.371.640.746,00 dan beban barang jasa sebesar 7.487.205.770,00. Terdapat beban penyusutan sebesar Rp.2.069.558.427,00. Beban amortisasi senilai Rp. 360.119.130,00 dan beban lain-lain berupa nilai buku penghapusan peralatan dan mesin senilai Rp.829.167,00 serta beban luar biasa senilai Rp.150.000.000,00.

Untuk belanja barang dan jasa terdapat utang beban yaitu beban belanja telepon, dalam laporan operasional disajikan sebesar jumlah belanja realisasi anggaran yaitu belanja telepon dalam tahun 2019 ditambah utang belanja telepon bulan Desember 2019 yang dibayar pada bulan Januari 2021. Sedangkan untuk beban persediaan yang disajikan dalam laporan operasional adalah sebesar realisasi jumlah persediaan tahun

2019, ditambah jumlah realisasi anggaran, dikurangi jumlah sisa persediaan akhir Desember 2019.

4.4.2 Surplus (Defisit)-LO

Dari jumlah Beban tahun 2020 sebesar Rp. 15.139.353.240,00 terdapat Defisit sebesar (Rp. 15.139.353.240,00)

4.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

4.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal tahun 2020 sebesar Rp. 6.573.632.058,68 merupakan Ekuitas akhir tahun 2019.

4.5.2 Perubahan Ekuitas

Dilihat dari jumlah Ekuitas awal dan Ekuitas akhir tahun 2020, terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. (1.661.345.420,00).

4.5.3 Ekuitas Akhir

Besarnya Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik tahun 2020 adalah sebesar Rp. 4.912.286.634,68.

BAB V

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar untuk Tahun Anggaran 2020, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan secara keseluruhan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) . Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini, Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, surplus/defisit, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dalam tahun anggaran 2020, Anggaran belanja sebesar Rp. 14.147.416.251,00 Terealisasi sebesar Rp. 13.478.007.816,00 Atau mencapai 95,27%. Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 669.408.435.
- Neraca menyajikan informasi posisi keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Denpasar mengenai aset, kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2020. Jumlah aset sebesar Rp. 4.913.276.63,68, sedangkan jumlah kewajiban sebesar Rp. 990.000,00 dan jumlah Ekuitas sebesar Rp. 4.912.286.634,68.
- Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang tercemin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam tahun anggaran 2019 jumlah Beban sebesar Rp. 12.806.669.026,73, sehingga terdapat defisit-LO sebesar (Rp. 12.806.669.026,73). Sedangkan dalam Tahun 2020, jumlah beban sebesar Rp. 15.139.353.240,00, terdapat defisit sebesar (Rp. 15.139.353.240,00). Jika dibandingkan dengan Jumlah beban tahun 2019, pada Tahun 2020 terdapat kenaikan jumlah beban sebesar Rp. (2.332.684.213,27) atau 15,41%. Kenaikan jumlah beban tersebut disebabkan karena adanya kenaikan nilai penyusutan aset pada Tahun Anggaran 2020, hal ini secara langsung mempengaruhi Aset dan Penyusutan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO dan ekuitas akhir. Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 6.573.632.058,68, sedangkan jumlah ekuitas akhir tahun 2020 sebesar Rp. 4.912.286.634,68. Sehingga terdapat perubahan ekuitas sebesar Rp. (1.661.345.424,00).
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dalam rangka pengungkapan yang memandai.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2020 yang dapat kami jelaskan dengan sebenarnya.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita acara Penutupan Kas, Rekening Koran per 31 Desember 2020 dan Buku kas Umum per 31 Desember 2020
2. Lampiran 2 : Data Persediaan per 31 Desember 2020
3. Lampiran 3 : Data Aset tetap per 31 Desember 2020
4. Lampiran 4 : Data Penyusutan
5. Lampiran 5 : Data Kewajiban / Hutang